

RUTIN DIGELAR SETIAP RABU PAGI

Open House Perdana, Hasto Senang Warga Antusias

YOGYA (KR) - Janji Walikota Yogya Hasto Wardoyo untuk tidak membuat sekat dengan masyarakat benar-benar dibuktikan. Melalui open house yang baru digelar perdana, Rabu (5/3) kemarin, Hasto mengaku senang lantaran warga menyambutnya dengan antusias.

Ajang bertemu langsung untuk berdialog dan mencurahkan keluh kesah dengan orang nomor satu di Kota Yogya ini bakal rutin digelar tiap Rabu pukul 05.30 hingga 09.00 WIB. Bertempat di ruang kerjanya komplek Balaikota Yogya, siapapun dan dari manapun bisa bertemu Hasto. Tak terbatas harus penduduk kota serta tak perlu mengajukan surat terlebih dahulu. "Saya senang karena ternyata warga antusias. Senang saya bukan karena itu saja, tetapi apa yang disampaikan ke saya itu sifatnya umum. Kebanyakan adalah kepentingan publik, bukan kok sifatnya pribadi," urainya di sela open house.

Kemarin, Hasto didampingi dua staf ahli yakni Wirawan Haryo Yudho dan Patricia

Heni Dian Anitasari. Selain itu terdapat beberapa staf di Bagian Protokol yang mencatat dan merekam setiap pembincangan yang disampaikan warga. Tidak kurang dari dua puluh warga yang menyampaikan gagasan, unek-unek hingga persoalan yang tengah dihadapinya kepada Hasto.

Menurut Hasto, open house atau membuka ruang secara khusus kepada masyarakat sebelumnya juga sudah ia lakukan ketika memimpin Kabupaten Kulonprogo. Kini, praktik positif tersebut juga bakal dilakukan di Kota Yogya. Setidaknya sepanjang dirinya menjadi pejabat publik serta tidak berbarengan dengan kegiatan mendesak. "Melalui pertemuan ini sebetulnya bisa membuka kanal-kanal yang tersumbat. Jadi arus komu-

nikasinya bisa semakin terbuka. Mereka yang ingin bertemu dengan walikotanya juga tidak perlu lagi harus mengajukan surat audiensi yang nanti prosesnya juga lama. Dijadwalkan dulu dan lain sebagainya. Ini juga bisa memangkas jalur komunikasi yang panjang hanya untuk bertemu walikota," paparnya.

Kader PDI Perjuangan ini pun berharap masyarakat yang hendak menyampaikan masukan atau persoalannya tetap mengedepankan kepentingan publik. Kendati demikian, dirinya juga membuka diri jika ada masalah pribadi yang butuh bantuan penyelesaiannya. "Seperti tadi ada guru PAUD yang selama ini kan bahkan tidak digaji. Beliau butuh laptop untuk mendukung pembelajaran.

Kalau itu harus diusulkan melalui mekanisme penganggaran, bisa jadi kan baru tahun depan terealisasinya. Hal-hal seperti ini saya kira bisa memangkas jalur birokrasi. Saya yakin, Pemkot pasti bisa membantu," urainya.

Tidak hanya persoalan, beberapa gagasan juga turut disampaikan warga melalui open house tersebut. Di antaranya bahkan pegiat lingkungan dari Singapura yang kebetulan berada di Yogya serta mengetahui agenda open house. Dirinya mengusulkan implementasi kawasan tanpa rokok yang sudah diberlakukan di Kota Yogya agar semakin diperluas. Ada pula usulan terkait penanganan sampah yang perlu melibatkan pihak produsen kemasan, lantaran sampah jenis kemasan produk cukup mendominasi di Kota Yogya.

Terkait beberapa masalah, kemarin juga bisa langsung dicarikan solusinya. Seperti

dampak penataan lapak pedagang yang langsung disampaikan Hasto ke OPD terkait. "Beberapa coba kita sambungkan agar tahu semua persoalannya. Tetapi semuanya tercatat. Misal yang berkaitan dengan aduan, jelas nanti jalurnya kemana. Itu pun akan kami sinergikan ke layanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) yang selama ini dikelola oleh Diskominfosan. Jadi semua tidak akan sia-sia," tandasnya.

Sementara itu, salah satu warga Ngampilan yang turut dalam open house, Muhammad Amin, mengapresiasi gebrakan Hasto yang membuka ruang bagi masyarakat untuk bertemu. Langkah tersebut hampir belum pernah dilakukan oleh walikota sebelumnya. Meski belum mendapatkan solusi yang sesuai keinginannya, namun tetap membuka harapan atas persoalan yang tengah dihadapinya.

Gus Min, sapaan akrabnya,



KR-Ardhi Wahdan

Hasto Wardoyo menerima keluh kesah warga yang memenuinya dalam ajang open house, kemarin.

memiliki persoalan tagihan pajak pemondokan berupa kurang bayar yang disampaikan sekaligus sejak tahun 2022 hingga 2024. Total tagihan kurang pajak tersebut mencapai sekitar Rp 33 juta. Dirinya berharap jika ada tagihan kurang bayar dapat disampaikan tahun itu juga. Apalagi data tahun 2022 sudah sulit dicari seiring pada masa itu tengah terjadi pandemi Covid-19.

"Tadi diusulkan untuk ajukan klarifikasi untuk bisa mendapatkan pengurangan pajak. Tetapi kalau tiga tahun sekaligus kan untuk mencari data juga tidak mudah. Harapan saya, pajak pemondokan di Kota Yogya dihapuskan seperti yang sudah dilakukan di Sleman. Semua sudah kena pajak kan, mulai dari PBB, listrik, air tanah, warga dapat apa coba," katanya. **(Dhi)-f**

MIRAS OPLOSAN KEMBALI MENELAN KORBAN

Pemda DIY Perketat Peredaran Minuman Keras

YOGYA (KR) - Awal bulan suci Ramadan sempat diwarnai dengan keprihatinan menyusul adanya kasus oplosan (miras) yang menelan korban. Korban yang usianya masih tergolong muda itu dinyatakan meninggal dunia setelah mengonsumsi minuman keras (miras) oplosan yang dicampur dengan pil sapi. Kejadian tersebut tidak hanya menyita perhatian sejumlah kalangan, tapi juga membutuhkan penanganan secara serius.

Menyikapi hal itu Pemda DIY akan memperketat pengawasan terhadap peredaran miras, terutama selama Ramadan. Karena kasus serupa tidak hanya terjadi di Bantul, tetapi juga mulai merebak di wilayah lainnya.

"Kejadian itu tidak hanya menimbulkan keprihatinan, tapi juga perlu menjadi perhatian bersama. Untuk itu kami terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Di Bantul, instruksinya tegas, tidak hanya itu kami juga sudah berulang kali meminta Komdigi untuk menghapus konten-konten yang mempromosikan miras ilegal," kata Sekda DIY, Beny Suharsono di Kompleks Kepatihan, Rabu (5/3).

Beny menyatakan, sebetulnya dalam meng-

hadapi Ramadan, Pemda DIY telah mengeluarkan surat edaran terkait pelaksanaan ibadah dan pentingnya menjaga toleransi antarumat beragama. Untuk itu pihaknya mengingatkan bahwa bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat kesadaran diri dan saling menghormati. Tragedi korban meninggal dunia akibat miras oplosan harus menjadi peringatan keras akan bahaya miras. Serta pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk memutus rantai peredaran miras ilegal demi melindungi generasi muda.

"Kami mengajak masyarakat untuk saling menghormati dan menahan diri. Ini bukan hanya soal aturan, tapi kesadaran kolektif untuk menjaga ketenangan selama bulan suci Ramadan," ungkapnya.

Menurut Sekda DIY, meski beberapa situs penjualan miras ilegal sudah ditutup, pelaku masih kerap mencari celah lain. Oleh karena itu, Pemda DIY mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat penegak hukum. Dengan sikap proaktif dari masyarakat diharapkan peredaran miras di DIY bisa ditekan. **(Ria)-f**

Buka Bersama di Masjid Al-Irsyad, Walikota Apresiasi Kegotongroyongan



KR-Juvintarto

Walikota turut berbuka puasa bersama saat even Ramadan Temu Umaro di Masjid Al-Irsyad, Karanganyar.

YOGYA (KR) - Walikota Yogyakarta dr H Hasto Wardoyo SpOG (K) mengapresiasi masjid-masjid di Kota Yogyakarta yang kental semangat kegotongroyongan di bulan Ramadan. Bukan hanya kekhusukan ibadah yang dirasakan, tetapi juga hablum minannas atau hubungan baik dengan sesama manusia terasa indah.

"Bulan Ramadan, kita diminta untuk beriman dan beramal saleh, menjalankan ibadah wajib dan sunah juga dengan zakat," tegas Hasto saat menghadiri Temu Umaro di Masjid Al-Irsyad, Selasa (4/3) di Jalan Sisingamangaraja, Kampung Karanganyar, Brontokusuman, Mergangsan, Kota Yogya.

Hasto disambut Ketua Tak-

mir Masjid Al Irsyad Helmi Kurniawan SIP, Penasihat Prof Sugeng Saptosurjono, Dewan Syuro Sarmidi, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta H Aris Madani SPD, MPP Mergangsan Pargiyat SIP dan jajaran Forkopimtren. Sekaligus berbuka bersama dengan ratusan jamaah yang hadir. "Setiap harinya di bulan Ramadan Masjid Al Irsyad sediakan 500 porsi untuk berbuka puasa menuju 1.000 porsi," papar Helmi.

Sarmidi menambahkan beragam kegiatan bertajuk 'Romadlon Berkah Masjid Al Irsyad' digelar selama bulan Ramadan yaitu Pasar Sore Ramadan, Buka Bersama, Kajian Menjelang Berbuka, Salat Tarawih/Tadarus/Anak, Salat Tarawih Ala Madinah,

"Juga ada Kajian Ba'da Subuh, Kajian Syekh Palestina 1&2, I'tikaf 10 Hari Akhir Ramadan, Panggung Takhiran dan Salat Idul Fitri," jelasnya. **(Vin)-f**

PT Global Karya Sejahtera Raya Perkuat Silaturahmi Kolega

YOGYA (KR) - PT Global Karya Sejahtera Raya, sebuah perusahaan kontraktor bangunan mengadakan kegiatan buka puasa bersama (bukber) di Hotel Cakra Kusuma, Jalan Kaliurang Yogyakarta, Selasa (4/3). Kegiatan diikuti sekitar 50 orang terdiri kolega/mitra dan sejumlah karyawan.

Yeni Purbasari selaku Direktur PT Global Karya Sejahtera Raya menuturkan bukber telah menjadi agenda rutin tahunan perusahaan saat Ramadan. Sebelum berbuka, diadakan penyampaian tausiyyah/pengajian, dilanjutkan ramah-tamah. "Tujuan utamanya sebagai wahana mempererat silaturahmi antara pimpinan perusahaan dengan karyawan, antara perusahaan dengan kolega/mi-

tra. Ya agar hubungan dengan mitra terus terjalin dengan baik, sehingga berdampak positif terhadap kinerja perusahaan," kata Yeni.

Menurut Yeni, banyak manfaat yang didapat oleh perusahaan melalui acara bukber ini. Selain sudah menjadi tradisi

perusahaan setiap Ramadan, juga akan semakin menguatkan kekompakan di internal perusahaan (pimpinan dan karyawan). "Diharapkan bukber ini membawa keberkahan sehingga perusahaan terus maju, tumbuh dan berkembang," pungkasnya. **(Dev)-f**



KR-Istimedia

Jajaran pimpinan PT Global Karya Sejahtera Raya saat bukber bersama kolega dan karyawan.

PENGAJUAN IZIN PBG SEPENUHNYA ONLINE

Tetap Dibutuhkan, Pemkot Perluas Klinik Konsultasi Perizinan

YOGYA (KR) - Klinik konsultasi perizinan, khususnya terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini semakin luas serta menempati area strategis di komplek Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogya. Meski pengajuan izin yang dulu bernama IMB ini sepenuhnya online, namun pertemuan tatap muka melalui klinik konsultasi dinilai masih tetap dibutuhkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Umi Akhsanti, mengungkapkan pengajuan PBG sejak tahun 2022 lalu sudah dimigrasikan ke Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). "Sekarang semua harus online menggunakan akun di simbg.pu.go.id. Tetapi kan banyak sekali dokumen yang harus diupload. Sehingga kita tetap butuh offline melalui klinik konsultasi ini untuk membantu pemohon," ungkapnya di sela peresmian ulang Klinik Konsultasi PBG di komplek MPP Kota Yogya, Rabu (5/3).

Klinik konsultasi tersebut kini menempati ruang MPP Kota Yogya sisi timur yang langsung menghadap ke pintu keluar. Sebelumnya ruangan itu berada di pojok utara sehingga keberadaannya kurang strategis. Saat ini, selain lokasi strategis juga dilengkapi sofa yang lebih nyaman untuk kepentingan konsultasi.

Umi menyampaikan, pihaknya juga

memfasilitasi layanan konsultasi melalui chatting atau WA. Akan tetapi ketika menyangkut siteplan atau gambar maka itu akan lebih mudah dijelaskan secara offline atau bertemu langsung. Oleh karena itu siapapun yang hendak mengajukan PBG dianjurkan konsultasi terlebih dahulu agar setiap dokumen bisa sesuai demi mempercepat akses layanan. "Kalau semua bisa sesuai aturan itu kan kami dibatasi maksimal 28 hari kerja sampai keluar PBG, atau 35 hari kerja sampai dengan pembayaran retribusinya. Tetapi realitanya ada yang sampai berbulan-bulan sehingga kami juga kasihan," imbuhnya.

Lama atau tidaknya durasi waktu untuk mendapatkan PBG sangat bergantung dari pemohon. Terutama jika ada dokumen yang dikembalikan dan harus diperbaiki, seringkali tidak langsung bisa ditindaklanjuti. Sebelum dokumen perbaikan itu dituntaskan, maka proses telaah untuk menerbitkan PBG juga belum bisa dilakukan. Sementara durasi waktu tetap dihitung berdasarkan tanggal penerimaan berkas. Padahal, mayoritas berkas yang diajukan membutuhkan perbaikan. Terutama berkaitan kesesuaian tata ruang serta perencanaan dalam gambar.

Oleh karena itu, imbu Umi, ketika ada dokumen yang dikembalikan untuk diperbaiki, pihaknya juga memberikan informasi kepada pemohon melalui pe-

san. Hal ini agar pemohon bisa mengecek akun SIMBG nya kemudian menindaklanjuti perbaikan dan segera diunggah kembali melalui sistem online. "Kadang pemohon tidak mengecek akun secara berkala, sehingga tidak tahu jika ada dokumen yang harus diperbaiki. Hal-hal seperti ini yang membuat proses PBG terkesan cukup lama. Sehingga melalui klinik konsultasi kami akan jelaskan secara gamblang. Layanan ini sama sekali tidak dipungut biaya," tandasnya.

Di samping itu, pada Desember 2024 lalu SIMBG juga melakukan migrasi besar-besaran ke versi 3.2. Kondisi itu membuat beberapa akun yang tersimpan maupun pengajuan yang berjalan menjadi terganggu. Terutama akibat perubahan ketentuan, data yang hilang maupun harus dimulai dari awal lagi. Keberadaan klinik konsultasi PBG pun setiap hari selalu ada pengunjung. Dalam sebulan rata-rata ada 50 pemohon PBG, sedangkan yang mengakses layanan konsultasi tidak kurang dari lima orang per hari.

"PBG ini kan izin untuk bangun baru maupun Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Harapan kami masyarakat jangan menyepelekan. Fungsi PBG bukan sebatas dokumen sah perizinan tetapi kami sangat detail dalam melihat konstruksinya apakah sesuai atau tidak. Jadi lebih ke aspek keamanan suatu bangunan," katanya. **(Dhi)-f**

OLEG YOHAN, FRAKSI PARTAI NASDEM

Dorong Event Penunjang, Pastikan Stok Jelang Lebaran



KOTA YOGYAKARTA

Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Yogya yang duduk di Komisi B, Oleg Yohan, menilai antipasi menjamin ketersediaan bahan makanan pokok maupun harga di pasaran untuk kebutuhan Ramadan sudah dilakukan dengan baik. "Kali ini layanan guna menunjang kebutuhan hari raya atau Lebaran harus mulai disiapkan. Terutama Dinas Perdagangan maupun UPT Bisnis yang ada di dalamnya," urainya, Rabu (5/3).

Untuk event penunjang, Oleg sudah meminta UPT Bisnis mengadakan kegiatan berupa Beringharjo Muslim Festival. Acara itu rencananya akan digelar mulai 10 Maret hingga akhir April mendatang. Tujuannya ialah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan harga murah sekaligus merangsang daya belinya. Kegiatan itu pun akan dikerjasamakan dengan BSI yang menyediakan hadiah. Bagi pedagang yang transaksinya tertinggi selama periode tersebut akan mendapatkan satu porsi tabungan haji dari BSI. Sedangkan pembeli disediakan hadiah berupa logam mulai dan uang tunai sebagai THR.

Dirinya juga meminta UPT Bisnis untuk tetap membuka layanan di

Pasar Beringharjo dan Pasar Prawirotaman. Bahkan saat ini diharapkan mulai melakukan kajian di Pasar Terban lantaran di lantai tiga kelak akan ada pusat kuliner dan aktivitas kerajinan yang dikelola UPT Bisnis.

Oleg menambahkan, hal yang tak kalah penting ialah Dinas Perdagangan harus menggelar operasi pasar guna menjaga potensi kenaikan harga jelang Lebaran. Dirinya pun mengapresiasi kesuksesan Pasar Murah Goes to Kemantren yang sudah digelar sejak 17 Februari lalu dan berakhir hari ini di Kotagede. "Saya melihat pasar murah di kemantren itu cukup berhasil dalam mengendalikan pasokan maupun harga di pasaran," tandasnya.

Kendati demikian, merujuk dari instruksi presiden terkait kegiatan operasi pasar, kebetulan Kota Yogya tidak menjadi sasaran dari sekitar 3.000 lokasi yang sudah ditargetkan pemerintah pusat. Hal ini bisa jadi

karena Yogya dinilai tidak mengalami persoalan terkait pasokan maupun harga di pasaran. Akan tetapi sesuai rencana Pemkot Yogya tetap akan melakukan operasi pasar di Beringharjo, Kranggan, Demangan dan Prawirotaman. Keempat pasar tradisional tersebut menjadi pasar kendali di Kota Yogya dan akan digelontor 48 ton bahan kebutuhan pokok jelang Lebaran.

"Intinya kami sudah meminta instansi terkait untuk meningkatkan layanan karena kebutuhan masyarakat untuk Lebaran biasanya meningkat. Jangan sampai ada persoalan di bidang stok dan harga, semua harus terjangkau. Tetapi peningkatan kebutuhan itu pun otomatis akan berdampak pada volume sampah. Sudah saya tekankan supaya pasar tradisional tidak menyumbangkan sampah ke depo," katanya. **(Dhi)-f**



KR-Ardhi Wahdan